

# RENJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



JL.HARAPAN BARU BLOK B NO. 15 KOMPLEKS SKPD SIDRAP

## KATA PENGANTAR

Komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Dalam Penyajian ini kami telah berupaya untuk dapat menyusunnya dengan baik dan semaksimal mungkin, namun segala keterbatasan yang dimiliki sehingga mungkin hasil yang dapat di capai belum seperti yang diharapkan.

Atas segala kekurangan tak lupa dimohon maaf dan semoga Rencana Kerja ( RENJA ) 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, 2023

Kepala Dinas,



**H.BACHTIAR, Shi. M. Si**

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip. 19710122 199203 1 003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika .....	9
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	18
II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikas dan Informatika.....	22
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan  
Informatika.....

38

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

III.3. Program dan Kegiatan..... 42

**BAB V PENUTUP..... 54**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu pesat dalam satu dasawarsa terakhir telah membawa implikasi kepada pesatnya pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan sektor-sektor tersebut merupakan faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang didukung oleh sektor komunikasi dan informatika yang handal.

Penyelenggaraan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu untuk melakukan pengaturan/penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, lancar dan tertib, hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat diwujudkan dalam sebuah rencana kerja secara proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Renja yang disusun merupakan hasil analisis dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2023.

## I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakat. Pendelegasian suatu kewenangan penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah secara internal akan diikuti pengaturan dalam aspek pembiayaan yang diatur dalam penimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memegang peranan penting dan memiliki tugas serta fungsi yang penting pula dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis menyebarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan sektor komunikasi dan informatika secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Landasan hukum yang lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daerah

6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )  
sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua

Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Permendagri No.86/2017 tentang pelaksanaan PP No.8 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2025
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Deaerah Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2023

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem RENJA bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 yang diperoleh.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Sebagai acuan Diskominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo Kab. Sidrap selama tahun 2024

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut ;

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### I 1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

### I.4 Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

### II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan lampiran

#### II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

#### III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu, indikatif, maupun kombinasi keduanya
- e. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal tersebut disebabkan pelaksanaan anggaran 2023 sementara berlangsung, karena itu capaian pelaksanaan renstra SKPD tahun 2024-2026 yang digunakan untuk mereview hasil pelaksanaan renja SKPD.

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kegiatan review hasil pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Kominfo dalam urusan kominfo yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan komunikasi dan informatika.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo dalam pelaksanaannya ada beberapa urusan yaitu urusan komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar Instansi. Tim bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Diskominfo Kab. Sidrap dalam menghadapi berbagai macam tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Di samping itu, RENSTRA yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Renstra dipandang sebagai :

- a. Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.

- c. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappag secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (Kebijakan dan program).

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Statistik Sektoral kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten /kota pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan ,pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Informasi dan Komunikasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan layanan hubungan media telah memenuhi target kinerjanya dari target 3 jenis media dan realisasinya 3 jenis media, selain dari itu pada program Aplikasi informatika kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan infra pemerintah Daerah kabupaten / kota juga telah memenuhi target kinerjanya dengan target 300 mbps dan realisasinya 300mbps

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik telah melebihi target kinerja hasil / keluarannya yaitu dari target 480 realisasinya menjadi 670 sekitar 139 %.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran;

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T-C29.

Kode Rekening	urusan /Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra Tahun 2024 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2023 (Taget APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Prgoram &Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
2	16	1								
2	16	02	01							
2	16	02	01							
2	16	02	2.01	04						
2	16	02	2.01	06						
2	16	02	2.01	07						
2	16	03								
2	16	03	2.01							

2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dok	30	1	1	1.0	100%	10	10.0	33
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	uni	150	300	300	300	100%	50	50	33
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan</b>			99	100	98.,90	98,90%	100	32.0	11
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dok	3	155	156	155	100%	1	1.0	33
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	pus	3	140	144	140	97%	1	1.0	33
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasis elektronik yang dikembangkan	apl	15	5	5	5.0	100%	5	5.0	33
2	20	03	2.01		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>		300	38,29	100.00	39.0	39%	100.00	32	11
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota</b>	<b>persentase data statistik yang tersedia</b>		300	38	100		0%	100		-
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	dok	15		5.00		0%	5.00		-
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	dok	3	93						-

2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah</b>		195	91	<b>46</b>		35%	<b>100</b>	16.0	8
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian</b>		300	1	100	91,14	91,14%	1	1.0	-
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	dok	3	1	1	1	100%	2		-
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	lap	6	4	2	21	100%	4		-
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	Lap	12	2	4	4	100%	29		-
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	perangkat daerah	87	62	<b>2.00</b>	12.0	600%	<b>62.00</b>	12.0	14
2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi</b>		300	29	100	100	100%	29	29.0	10
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	perangkat daerah	87	96	<b>29</b>	29.0	100%	<b>100</b>	29.0	33
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			95	<b>100</b>	19.0	19%	<b>100</b>	19.0	6
2	16	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah</b>			4	100	96.0	96%	4		-

2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	12	1	4	4.0	100%	2		-
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	6	97	1	1.0	100%	100		-
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		300	100	100	97	97%	288	144.0	48
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	864	12	12	12.0	100%	5	2.0	0
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	lap	6	96	5	5.0	100%	100	3	50
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>		3000	100	100	96.0	96%	100	2	2-
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	15	15.00	100%	4	0	-
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12		12	12	100%	4	0	-
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	36	58	200	0.0	0%	12	0	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	36	100	337.00	111.0	17%	12	6	50
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100	6	100	100.0	2%	100		-

2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan		3	92	6.00	6.0	100%	3		
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			150	100	93.0	93%	100	50	17
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	12	10	1181	150	13%	12	6	(6)
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	36	12	12	10.0	83%	12	4.0	(8)
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	36	78	12.00	12.0	100%	12	6.0	50
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			10	100	78	78%	15	10	(5)
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	45		15	10	67%	10		(10)
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30							

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T C30

**TABEL T-C30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SPM/STD NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			Realisasi Capaian		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	5	6	7	10	11	12	13
	<b>IKK lama</b>										
1	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet			100	99	98					
2	Persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet dan internet lainnya			100	99	98					
3	Persentase penyebar luasan informasi dan kerjasama media yang dikelola			100	100	100					
4	Sistem data dan statistic yang terintegrasi										

5	Persentase dokumen data/informasi dan statistic sectoral yang dihasilkan			100	100	100					
6	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah			100	100	100					
7	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah			29	29	29					
	<b>IKK Baru</b>										
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						100	100	100	100	
9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						75	100	100	100	

10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								100	100	
11	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah								100	100	
12	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah						31,32	37,52	64	65	

## **II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

### **11.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja OPD**

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Penguatan Keterbukaan Informasi
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik;
- e. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian;
- f. Perkembangan Teknologi Informasi;
- g. Program satu data Indonesia

### **II.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang**

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsinya yaitu :

#### **Urusan komunikasi dan Informatika**

- Belum tersosialisasikannya ke Masyarakat Layanan Aduan Seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP
- Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik
- Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

- Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik ( Media Cetak, Online dan Elektronik)
- Infrastruktur Jaringan TIK belum lengkap
- Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
- Kurangnya Fasilitas pusat data ( Server )
- Aplikasi yang digunakan belum terintegrasi dengan aplikasi pemerintah pusat
- Belum adanya rencana induk / master plant TIK / arsitektur SPBE
- Kurangnya SDM bidang TIK

#### **Urusan Statistik**

- Kurangnya sumber daya manusia (SDM ) dibidang statistik
- Kurangnya infrastruktur penyelenggaraan statistik

#### **Urusan Persandian**

- Kurangnya sosialisasi tata cara penggunaan sertifikat elektronik
- Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi Elektronik dari BsrE
- Jumlah pengguna atau pegawai yang memiliki akun sertifikasi digital masih rendah
- Belum terpusatnya pengelolaan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi
- Rendahnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknologi Informasi (TI)

#### II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program ,kegiatan, sub kegiatan , serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Berdasarkan tabel T-C. 31 maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2024 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 2.398.152.368,-

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2024 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 513.356.000,-

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2024 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp.2.357.516.000 -

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2024 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 63.492.000,-

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2024 dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 57.992.000,-

Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat ditabel T-C31.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2024**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar1 Dari 6

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>1,020,086,000</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>0</b>		<b>513,356,000</b>	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	480 dokumen	180,316,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	480 dokumen	151,227,000	
	Pelayanan Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 dokumen	102,129,000	Pelayanan Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 dokumen	72,129,000	
	Layanan Hubungan Media	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	737,641,000	Layanan Hubungan Media	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	290,000,000	
2	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>2,296,797,500</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>0</b>		<b>2,357,516,000</b>	

<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Persentase domain dan sub domain yang dikelola</b>		<b>1,807,342,000</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Persentase domain dan sub domain yang dikelola</b>		<b>2,003,350,000</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	6,001,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	2,009,000	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50 unit	1,801,341,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50 unit	2,001,341,000	
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan</b>	<b>100</b>	<b>489,455,500</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan</b>	<b>100</b>	<b>354,166,000</b>	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	120,767,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	13,719,000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenren g	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	1 unit	77,057,000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenren g	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	1 unit	3,116,000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenren g	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	5 unit	291,631,500	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenren g	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	5 unit	337,331,000	
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Pangkajene Sidenren g</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	100.00	<b>17,001,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Pangkajene Sidenren g</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	#####	<b>63,492,000</b>	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	17,001,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	13,492,000	
					-	Penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pangkajene Sidenreng	jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	1 dokumen	50,000,000	
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)</b>	Pangkajene Sidenreng	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	100	133,556,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)</b>	Pangkajene Sidenreng	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	100	57,992,000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pangkajene Sidenreng	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian		34,324,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pangkajene Sidenreng	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	1 kebijakan	8,760,000	

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	7,119,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	1,901,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	2 laporan	6,811,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	2 laporan	1,601,000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkajene Sidenreng	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4 laporan	7,398,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pangkajene Sidenreng	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4 laporan	1,233,000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	29 opd	12,996,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	29 opd	4,025,000

	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi</b>		99,232,000	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi</b>		49,232,000	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	29 opd	99,232,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	29 opd	49,232,000	
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				2,883,085,500	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				2,398,152,368	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah</b>		11,444,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah</b>		7,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4,919,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,525,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	jumlah dokumen DPASKPD yang tersusun	1 Dokumen	4,000,000	

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2,375,588,000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2,142,468,368
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/ 12 Orang/bulan	2,371,486,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/ 12 Orang/bulan	2,139,468,368
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	4,102,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	3,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>		<b>182,864,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>		<b>45,144,000</b>
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1,515,000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	500,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	51,235,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	13,644,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	128,114,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	30,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenren g</b>	<b>Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>189,376,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenren g</b>	<b>Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>138,500,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110,876,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene Sidenren g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62,000,000

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>113,173,500.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pangkajene Sidenreng</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>65,040,000.00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	104,929,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	56,040,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8,244,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9,000,000	
<b>Jumlah</b>				<b>6,350,526,000</b>					<b>5,390,508,368</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat Bottom-Up. Bottom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

**TABEL T-C 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional untuk memantapkan pemulihan ekonomi dan system kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. RKP tahun 2024 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- Tujuan Strategis
  1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
  2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
  3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.
- Sasaran Strategis
  1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
  2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
  3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
  4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
  5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
  6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
  7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
  8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
  9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tiga tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah 2024-2026

Melalui visi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

### **III.2.1 Tujuan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2024, maka rencana kerja yang dimaksud adalah :

- Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik
- Meningkatkan kualitas pelayanan Data Statistik
- Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan informasi

### **Indikator Tujuan**

- Indeks SPBE
- Persentase Data Statistik yang dipublikasikan
- Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan

### **III.2.2 Sasaran**

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah untuk terwujudnya :

- Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa
- Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
- Tersedianya Data Statistik Sektoral dalam portal satu data daerah
- Meningkatnya pengamanan sistem Pemeintah Berbasis Elektronik ( SPBE )
- Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

### III.2.3 Indikator Sasaran

- Persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola
- Persentase luas wilayah yang tercoverange dengan jaringan internet
- persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah
- jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tiga tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tiga tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah (RPD )2024-2026

Melalui visi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

#### IV. Program dan Kegiatan

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi RPD Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari :

##### I. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan informasi, penyediaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah di Kab.Sidrap, yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi & pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sub Keegiatannya adalah

1. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
2. Pelayanan informasi publik
3. Layanan hubungan media

## II. Program Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) serta meningkatkan pengelolaan aplikasi dalam menunjang system pemerintahan berbasis Elektronik ( SPBE ) bagi pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang terkait program ini adalah :

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

## III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan data informasi statistic sektoral sebagai bahan / dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan instansi pemerintah daerah.adapun Kegiatan yang terkait program ini adalah:

- a. Koordinasi dan Sikronisasi pengumpulan,Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral
- b. Penyelenggaraan otorisasi Statistik sektoral Daerah

#### **IV. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ( PPIPD )**

Program ini dimaksudkan untuk Mengoptimalkan Fungsi Pemerintah Daerah guna mempromosikan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan informasi dan untuk menciptakan tertib administrasi kearsipan persandian, arsip yang teratur, aman dan juga sebagai sarana pengiriman berita yang lebih cepat dan efisien dan aman dengan kegiatan antara lain :

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penetapan kebijakan Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelohan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

**Adapun program penunjang urusan**

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan yaitu**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan yaitu**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD

**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**

- PenataUsahaan Barang Milik Daerah

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Keegiatannya adalah :**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah**

**Sub Keegiatannya yaitu**

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C33



**TABEL T-C33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan informatika

lembar1 dari 6

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	1					2	4	8		11	14			17
	2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
						Komunikasi dan Informatika								
I	2	16			1	Program Komunikasi dan Informasi Publik	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pangkajene Sidenreng	100	513,356,000	APBD II		100	515,356,000
	2	16	02		01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	Pangkajene Sidenreng	100	513,356,000	APBD II		100	515,356,000
	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkajene Sidenreng	480 dokumen	151,227,000	APBD II		480 dokumen	153,227,000

	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	25 dokumen	72,129,000	APBD II		25 dokumen	72,129,000
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Pangkajene Sidenreng	3 layanan	290,000,000	APBD II		3 layanan	290,000,000
	2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	Pangkajene Sidenreng	100.00	<b>2,357,516,000</b>	APBD II		100	<b>2,359,516,000</b>
	2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase domain dan sub domain yang dikelola</b>	Pangkajene Sidenreng	100	<b>2,003,350,000</b>	APBD II		100	<b>2,005,350,000</b>
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	10 dokumen	2,009,000	APBD II		10 dokumen	2,009,000
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	50 unit	2,001,341,000	APBD II		50 unit	2,003,341,000
	2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan</b>	Pangkajene Sidenreng	100	<b>354,166,000</b>	APBD II		1000	<b>354,166,000</b>

	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	13,719,000	APBD II		1 dokumen	13,719,000
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	Pangkajene Sidenreng	1 unit	3,116,000	APBD II		1 unit	3,116,000
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemintah berbasis elektronik yang dikembangkan	Pangkajene Sidenreng	5 unit	337,331,000	APBD II		5 unit	337,331,000
<b>II</b>	2	20	03	2.01		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	100.00	<b>63,492,000</b>	APBD II		100	<b>63,492,000</b>
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	persentase data statistik yang tersedia	Pangkajene Sidenreng		<b>63,492,000</b>	APBD II			<b>63,492,000</b>
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	5 dokumen	13,492,000	APBD II		5 dokumen	13,492,000
	2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	50,000,000	APBD II		1 dokumen	50,000,000
<b>III</b>	2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>100.00</b>	<b>57,992,000</b>	APBD II		<b>100</b>	<b>58,591,000</b>

	2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>100</b>	<b>8,760,000</b>	APBD II		<b>100</b>	<b>9,359,000</b>
	2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	1,901,000	APBD II		1 dokumen	2,500,000
	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	Pangkajene Sidenreng	2 laporan	1,601,000	APBD II		2 laporan	1,601,000
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenreng	2 laporan	1,233,000	APBD II		4 laporan	1,233,000
	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Pangkajene Sidenreng	29 opd	4,025,000	APBD II		29 opd	4,025,000
<b>IV</b>	2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>62.00</b>	<b>49,232,000</b>	APBD II		<b>62</b>	<b>49,232,000</b>

	2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Pangkajene Sidenreng	29 opd	49,232,000	APBD II		29 opd	49,232,000
<b>V</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	<b>100</b>	<b>2,398,152,368</b>	APBD II		<b>100</b>	<b>2,442,458,451</b>
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	Pangkajene Sidenreng		7,000,000	APBD II			7,000,000
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	4 dokumen	3,000,000	APBD II		4 dokumen	3,000,000
	2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2 dokumen	4,000,000	APBD II		2 dokumen	4,000,000
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng		2,142,468,368	APBD II			2,162,774,451
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	24/ 12 Orang/bulan	2,139,468,368	APBD II		24/ 12 Orang/bulan	2,159,774,451
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	5 Laporan	3,000,000	APBD II		5 laporan	3,000,000
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Pangkajene Sidenreng		45,144,000	APBD II			63,144,000

	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4 paket	500,000	APBD II		4 paket	500,000
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4 paket	1,000,000	APBD II		4 paket	1,000,000
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 dokumen	13,644,000	APBD II		12 dokumen	13,644,000
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	12 laporan	30,000,000	APBD II		12 laporan	48,000,000
	2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng		<b>138,500,000</b>	APBD II			<b>144,500,000</b>
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	4 laporan	1,500,000	APBD II		4 laporan	1,500,000
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	75,000,000	APBD II		12 Laporan	78,000,000
VI	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	62,000,000	APBD II		12 Laporan	65,000,000
	2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pangkajene Sidenreng	100.00	<b>65,040,000</b>	APBD II		100.00	<b>65,040,000</b>
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	15 unit	56,040,000	APBD II		15 unit	56,040,000

	2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkajene Sidenreng	10 unit	9,000,000	APBD II		10 unit	9,000,000
<b>Jumlah</b>										<b>5,390,508,368</b>				<b>5,439,413,451</b>

## BAB V

### PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2024 SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 3 Tahun ke depan sesuai waktu RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih.

Pangakajene Sidenreng, 2023

Kepala Dinas,

**H.BACHTIAR,Shi.M.Si**

Pangkat :Pembina Tk I

Nip. 19710122 199203 1 003

